



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN SYAFWADI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
3. NHK : 729705

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.044.000.000

1. Tanah Seluas 452 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 744.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 540.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR
(4X4)/JEEP/MP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP RA A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 163.495.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 103.400.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.850.895.000

III. HUTANG Rp. 361.422.234

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.489.472.766

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.